

ABSTRAKSI

Wacana “Moderasi” PP Muhammadiyah (Studi Mengenai Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Kontra-Terrorisme di Indonesia)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui memahami *framing* wacana moderasi PP Muhammadiyah mempengaruhi penetapan kebijakan kontra-terorisme dan radikalisme di Indonesia. Argumen utama tulisan ini adalah aktor-aktor gerakan di Muhammadiyah berjejaring menggalang kegiatan dan mengkonstruksikan wacana yang kemudian diaktualisasikan dalam sebuah advokasi kebijakan, perlu dipahami dalam perspektif *framing* dalam gerakan sosial. Temuan lapangan menunjukkan terdapat dua motif PP Muhammadiyah melakukan *framing* wacana, secara objektif, melegitimasi sikap menolak program deradikalisasi dan secara subyektif, counter polemik yang memperhadapkan adanya konflik dengan BNPT. Selanjutnya untuk melacak implikasi *framing* wacana pada penetapan agenda kebijakan, terdapat tiga saluran yakni *problems stream*, *policies stream*, dan *politics stream*. Data untuk menyusun penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks yang dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta, yakni bulan Maret hingga September 2017.

Kata kunci: PP Muhammadiyah, *framing*, wacana moderasi, kebijakan deradikalisasi, agenda kebijakan

ABSTRACT

Moderation Discourse in PP Muhammadiyah : Study on the Role of Civil Society Organization on Counter-terrorism Policy in Indonesia

The aim of this research is understanding moderation discourse framing on Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah which affects Indonesia's counter-terrorism and deradicalization policy in Indonesia. The main argument of this article is: several movement actors in Muhammadiyah are actively building networking to create events and construct certain discourse and being actualized in advocacy policy, which is pivotal in understanding framing perspective on social movement. Research finding shows two motives behind PP Muhammadiyah Policy in producing discourse framing, i.e. objectively legitimizing its behaviour against deradicalization program and subjectively countering polemic whom reflects on existing conflicts with BNPT. Furthermore, in order to trace the implications of discourse framing in policy agenda, the researcher uses three variables to examine them, namely: problems stream, policies stream, and politics stream. Data for this research is obtained through qualitative approach with participant observation, in-depth interview documents reviews, and text analysis and which is held in Jakarta and Yogyakarta on March until September 2017.

Keyword: PP Muhammadiyah, framing, moderation discourse, deradicalization, policy agenda.